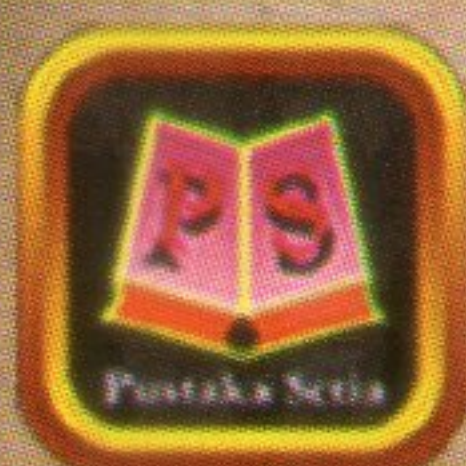


Dr. Muslim Mufti, M.Si.  
Drs. H. Ahmad Syamsir, M.Si.

# PEMBANGUNAN POLITIK



Pengantar  
Dr. H. Asep Saeful Muhtadi, M.A.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NO. 28 TAHUN 2014

TENTANG HAK CIPTA

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

---

**PEMBANGUNAN POLITIK**

---

ISBN 978-979-076-615-0

Cet. I: Desember 2016, 16 x 24 cm, xx + 414 hlm.

Penulis: Dr. Muslim Mufti, M.Si.

Drs. H. Ahmad Syamsir, M.Si.

Pengantar: Prof. Dr. H. Asep Saeful Muhtadi, M.A.

Editor: Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si.

Desain Sampul: Tim Desain Pustaka Setia

Setting, Montase, Layout: Tim Redaksi Pustaka Setia

Cetakan ke-1: Desember 2016

Diterbitkan oleh:

**CV PUSTAKA SETIA**

Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164

Telp. (022) 5210588, Faks. (022) 5224105

E-mail: [pustaka\\_seti@yahoo.com](mailto:pustaka_seti@yahoo.com)

Web. [www.pustakasetia.com](http://www.pustakasetia.com)

Bandung 40253

**(Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat)**

---

Copyright © 2016 CV PUSTAKA SETIA

Dilarang mengutip memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit.

Hak penulis dilindungi undang-undang.

*All right reserved*



# DAFTAR ISI

<b>BAB 1</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konsep Pembangunan Politik .....	1
B. Teori Tahap dan Modernisasi .....	13
<b>BAB 2</b>	
<b>PARTISIPASI POLITIK DAN PERILAKU PEMILIH .....</b>	<b>15</b>
A. Bentuk Partisipasi Politik .....	21
B. Perubahan Perilaku Politik Terhadap Partisipasi Politik .....	23
C. Dimensi Subjektif Individu .....	28
D. Partai Politik .....	29
E. Daftar Partai Politik di Indonesia .....	34
<b>BAB 3</b>	
<b>MODEL DEMOKRASI WESTMINSTER DAN MODEL DEMOKRASI KONSSENSUS .....</b>	<b>53</b>
A. Pendahuluan .....	53
B. Model Demokrasi Konsensus .....	57
C. Hubungan antara Demokrasi Langsung Prinsip Mayoritarian dan Konsensus .....	60
D. Demokrasi di Indonesia .....	62



E.	Analisis Demokrasi Indonesia Berdasarkan Model Demokrasi Arendt Lijphart.....	63
F.	Undang-undang Partai Politik Cermin Demokrasi di Indonesia .....	68

#### **BAB 4**

<b>BIROKRASI DAN POLITIK .....</b>	<b>153</b>
A. Konsep Birokrasi .....	155
B. Tipe dan Bentuk Birokrasi .....	157
C. Reformasi Birokrasi Indonesia .....	162

#### **BAB 5**

<b>PLURALISME DAN ELITISME .....</b>	<b>169</b>
A. Perpecahan Suku dan Negara-negara Bagian Nasional .....	169
B. Konseptor Elite Politik .....	178

#### **BAB 6**

<b>MILITER DAN POLITIK .....</b>	<b>183</b>
A. Konsolidasi Demokrasi .....	185
B. Militer Profesional .....	191
C. Perubahan Karakteristik Militer .....	198
D. Kontrol Sipil atas Militer .....	205
E. Supremasi Sipil .....	210
F. Demokratisasi .....	212
G. Undan-undang Pemerintahan Daerah dan Pilkada di Indonesia .....	217

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>427</b>
-----------------------------	------------

<b>PROFIL PENULIS .....</b>	<b>438</b>
-----------------------------	------------



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konsep Pembangunan Politik

Ronald H. Chilcotte mengemukakan bahwa teori-teori pembangunan politik memiliki beberapa tipe, yaitu sebagai berikut:

1. berasosiasi dengan gagasan demokrasi;
2. fokus pada aspek-aspek pembangunan dan perubahan politik;
3. menguji krisis dan konsekuensi pembangunan politik.

Pembangunan politik diimbangi dengan pemerintahan yang kuat dan kewenangan yang teratur. Pertanyaan berkisar pada derajat kebebasan pers, sistem partai, kebiasaan pemberian suara, dan standar hidup. Kondisi demokrasi menyertakan sistem kelas terbuka, kesejahteraan ekonomi, ekonomi kapitalis, semakin tinggi tingkat industrialisasi, pendidikan, kesejahteraan, semakin besar pula prospek demokrasi.

Pada saat pemerintahan berkembang melalui peningkatan pembedaan, krisis kesetaraan, dan kapasitas maka dapat menimbulkan situasi krisis identitas, legitimasi, partisipasi, penetrasi, dan distribusi. Krisis identitas berkaitan dengan budaya massa dan elite dalam pengertian perasaan nasional mengenai wilayah, pembelahan mengenai wilayah yang menggerogoti kesatuan nasional, dan konflik antarloyalitas etnik dengan komitmen nasional. Krisis legitimasi tumbuh karena perbedaan mengenai kewenangan. Krisis partisipasi merupakan konflik yang terjadi ketika elite



# BAB 3

## MODEL DEMOKRASI WESTMINSTER DAN MODEL DEMOKRASI KONSENSUS

### A. Pendahuluan

Menurut Arendt Lijphart<sup>1</sup> model demokrasi terdiri atas dua macam, yaitu model demokrasi Westminster dan model demokrasi konsensus.

Dasar model Westminster adalah *majority rule*. Model ini dapat dilihat sebagai solusi yang paling nyata mengenai dilema tentang maksud "rakyat (*the people*)" dalam definisi demokrasi. Siapa yang akan memerintah dan pada kepentingan siapa pemerintah merespons ketika rakyat tidak setuju dan mempunyai pilihan berbeda? Jawabannya adalah *the majority of the people*. Manfaat besar dari jawaban lain, seperti syarat kebulatan suara hanya salah satu jawaban, memerlukan *minority rule* –atau sekurang-kurangnya hak suara minoritas (*minority veto*)– dan pemerintahan oleh mayoritas dan sesuai dengan keinginan mayoritas lebih dekat pada demokrasi yang ideal, lalu pemerintahan lebih dekat dan mau mendengarkan minoritas. Alternatif jawaban untuk dilema ini adalah sebanyak orang dimungkinkan.

Arendt Lijphart berpendapat bahwa demokrasi dengan prinsip mayoritarian lebih tepat diterapkan pada masyarakat yang bersifat homogen, sedangkan demokrasi dengan prinsip konsensus lebih tepat diterapkan pada masyarakat yang heterogen. Pendapat ini diterapkan pada

---

1. Arendt Lijphart, *Democracies Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Century*, New Haven dan London: Yale University Press, 1924.



## BAB 4

# BIROKRASI DAN POLITIK

Dalam membangun suatu pemerintahan, suatu birokrasi senantiasa mengarah pada tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan mengamalkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip yang penting adalah kekuasaan berada di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa atau birokrat sehingga akan melahirkan sistem kontrol yang memadai dari rakyat. Dengan demikian, pejabat birokrasi bekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menggambarkan kewajiban birokrasi dan menyampaikan akuntabilitasnya kepada rakyat. Akan tetapi, birokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh kultur dan etika birokrasi<sup>1</sup> dan tidak dapat mengadopsi rasionalitas birokrasi dari Weber. Hal ini terbukti dari tidak berlakunya sepenuhnya semua aturan dan tata prosedur yang tegas dan impersonal dalam praktik pemerintahan di Indonesia. Korupsi di birokrasi terjadi melalui penyimpangan arah dan kinerja sehingga birokrasi tidak berfungsi sebagaimana idealnya selaku pengabdian cita-cita dan tujuan bangsa serta negara. Secara empiris, bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi berupa penyalahgunaan keuangan negara, manipulasi anggaran, dan sebagainya. Pejabat birokrasi memandang dan memahami sumber daya yang ada

---

<sup>1</sup> Kultur birokrasi adalah karakter kolektif masyarakat dalam menghayati dan memperlakukan birokrasi, sedangkan etika birokrasi adalah karakter individu atau kelompok dalam hal ini aparatur birokrasi, baik secara individu maupun kolektif dalam memahami dan memberlakukan kewenangan dan tugasnya sebagai aparatur birokrasi, lihat M. Mas'ud Said, *Birokrasi di Negara Birokratis: Makna Masalah dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia*, UMM Press, 2007, hlm. 189.



## **BAB 5**

# **PLURALISME DAN ELITISME**

### **1. Perpecahan Suku dan Negara-negara Bagian Nasional**

#### **1. Etnisitas dan Konflik Etnis**

Sejak tahun 1860 hingga 1960-an, para ahli dan teorisi liberal dan politik sosialis, dalam signifikansi politis terhadap perpecahan etnis, religius, dan kultural dalam masyarakat sebuah negara, meninggalkan perbedaan kelas dan ekonomi sebagai isu yang paling penting dalam perdebatan politik. Hal ini sepenuhnya rasional karena perpecahan agama, kultur, dan etnis lebih sulit untuk diselesaikan daripada perpecahan ekonomi, baik yang terjadi di berbagai negara maupun kelas-kelas dalam sebuah masyarakat. Selain itu, lebih mudah bagi mereka untuk meredakan perpecahan ekonomi, dengan sebuah proses penyesuaian kenaikan gaji daripada meredakan perpecahan agama, kultur, atau etnis.

Pada abad ke-20, pertumbuhan industri, urbanisasi, dan kemakmuran di masyarakat Barat, di mana pun selalu diikuti dengan penurunan dalam perasaan beragama. Akan tetapi, hal ini memberikan keuntungan politik, seperti menurunnya konflik politik yang disebabkan oleh perpecahan agama di Eropa. Demikian pula, pertumbuhan integrasi politik di banyak negara Barat yang maju telah mendorong terjadinya penurunan bahasa kaum minoritas, dan semakin menghilangnya bahasa kesukuan, semakin menguntungkan perpolitikan.



## **BAB 6**

# **MILITER DAN POLITIK**

Dari perdebatan yang muncul berkaitan dengan hubungan sipil-militer tampak jelas bahwa permasalahan antara sipil dan militer sangat kompleks. Hubungan sipil-militer yang ideal adalah militer di bawah kendali atau di bawah otoritas sipil. Dengan kata lain, militer dikendalikan oleh sipil. Persoalan sipil-militer bisa muncul bermula dari persoalan sipil semata, persoalan militer, atau persoalan dari sipil dan militer. Persoalan serius yang sering dijumpai adalah ketika politisi sipil meminta bantuan militer untuk menopang kekuasaannya.

Beberapa analisis menyebutkan beberapa indikator tentang hubungan sipil-militer, misalnya hubungan sipil-militer akan baik apabila perhatian militer hanya berpusat pada permasalahan militer. Persoalannya muncul ketika militer menjalankan fungsi sipil atas permintaan politisi sipil dan tidak jelasnya garis batas antara militer dan sipil.

Indikator frekuensi konflik juga dapat mengukur baik-tidaknya hubungan sipil-militer. Hubungan sipil-militer dikatakan baik jika antara pemimpin sipil dan militer tidak banyak terjadi konflik. Akan tetapi, indikator ini memiliki kelemahan yang mendasar, yaitu dalam negara yang plural konflik sering mencerminkan kondisi yang tidak terhindarkan dan diharapkan dalam sistem politik yang plural.

Ukuran lainnya untuk menentukan hubungan baik sipil-militer adalah pejabat sipil-militer saling menyukai dan menghormati satu sama lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar. 1992. *Javanese Voters: a Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*. Yogyakarta: GMU Press.
- \_\_\_\_\_. 1998. "Merangsang Partisipasi Politik Rakyat" dalam Indria Samego (Pengantar). *Demitologisasi Politik Indonesia: Mengusung Elitisme dalam Orde Baru*. Jakarta: CIDES.
- Agus Wirahadikusuma. 1999. *TNI Menghadapi Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Alfred Stepan. 1978. *The State and Society: Peru in Comparative Perspective*. NY: Princeton University Press, Princeton.
- Amos Perlmutter. 2000. *Militer dan Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Anders Uhlin. 1998. *Oposisi Berserak: Arus Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Anders Wetholm dan Richard G. Niemi. 1992. "Political Institution and Political Socialization: a Cross-National Study" dalam *Jurnal Comparative Politics Studies*, Vol. 24. No. 1 - Oktober.
- Andrew Heywood. 2000. *Key Concept in Politics*. New York: Palgrave.
- Anonimous. 1999. *Dokumen; Paradigma Baru Peran TNI*. Jakarta: Mabes ABRI.
- Anthony Giddens. *The Central Problem in Social Theory*. 1985. London: Macmillan.



- Anthony H. Birch. 2001. *The Concepts and Theories of Modern Democracy*. 2<sup>nd</sup> Edition Rothledge London and New York.
- Arie Sujito dan Sutoro Eko (editor). 2002. *Demiliterisasi, Demokratisasi*. Yogyakarta: IRE Press.
- Arief Budiman. (Ed.). 1990. *State and Civil Society in Indonesia*. Sydney: Allen and Unwin.
- \_\_\_\_\_. 1991. *Negara dan Pembangunan: Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan*. Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia.
- Atantya H. Mulyanto. 1999. "Mengkaji Kembali Dikotomi Peran Politik ABRI", dalam Abdulrahman Wahid dkk. *Berpolitik atau Kembali ke Barak*. Yogyakarta: Bigraf.
- Atilio Boron. 1981. "Latin America: Between Hobbes and Friedman". *New Left Review*, 130, November/December.
- B. Guy Peters. 2001. *The Politics of Bureaucracy*. London and New York: Routledge.
- Benjamin Barber. 1984. *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*. Berkeley: University of California Press.
- Bryan Turner. 1978. *Marx and the End of Orientalism*. London: George Allen and Unwin.
- Burhan D. Magenda. 2000. "Kata Pengantar Edisi Bahasa Indonesia", dalam Amos Perlmutter. *Militer dan Politik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- \_\_\_\_\_. 2001. "Kata Pengantar", dalam Arif Yulianto. *Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca ORBA: di Tengah Pusaran Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- C. Wright Mills. 1956. *The Power Elite*. London: Oxford University Press.
- C.P.T. George Yeo. 1981. *The Military and the Nation State*. Journal. Singapore: Pointer Journal.
- Chantal Moufie. 1996. "Citizenship". dalam Seymour Martin Lipset (Ed.). *The Encyclopedia of Democracy*. Vol. III. Washington D.C: Congreassional Quarterly Inc,



- Christina Holtz-Bacha. 2008. "Political Disaffection", dalam Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha. *Encyclopedia of Political Communication*. California: Sage Publications.
- Claude E. Welch. 1971. *Military Role and Perspective on Civil-Military Relation*. Massachausett: Duxbury Press.
- \_\_\_\_\_. 1998. "Studi Perbandingan Modernisasi Politik", dalam Yahya Muhaimind dan Colin MacAndrews (Eds.). 1998. *Masalah-masalah Pembangunan Politik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Colin Leys. 1996. *The Rise and Fall of Development Theory*. London: James Currey, Indiana University Press.
- D. Jackson dan Lucian W. Pye (Ed.). 1978. *Political Power and Communications in Indonesia*. California and London: University of California Press.
- David C. Korten. 1988. "Kerangka Kerja Perencanaan untuk Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat", dalam David C. Korten dan Sjahrir, (Eds.). *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- David Denver. 1989. *Election and Voting Behavior in Britain*. London: Philip Allan Publish.
- David F. Roth dan Frank Wilson. 1976. *The Comparison Study of Politics*. Boston: Houghton Company.
- Dean Jaros dan Lawrence V. Grant. 1974. *Political Behavior: Choice and Perspective*. London: St. Martin's Press.
- Deden Faturhman dan Wawan Sobari. 2002. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Didik Rachbini. (Ed). *Negara dan Kemiskinan di Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Douglas Chalmers. 1985. "Corporatism and Comparative Politics", dalam Howard Wiarda (Ed.). *New Directions in Comparative Politics*. Colorado: Westview Press, Boulder.
- Dwaine Marvick dalam Adam Kuper dan Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eep Saefullah Fatah. 2000. *Zaman Kesempatan Agenda-agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*. Bandung : Mizan.



- Eliot A. Cohen. 2002. *Supreme Command*. New York: The Free Press.
- Ellen Kay Timberger. 1977. "State Power and Modes of Production: Implication of the Japanese Transition to Capitalism", *The Insurgent Sociologist*. VII (11) Spring.
- Ellizabeth Kier. 1996. *Imaging War*. London: Free Press.
- Eric A. Nordlinger. 1990. *Militer dalam Politik*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Franz Urban Pappi. 1996. "Political Behavior: Reasoning Voters and Multi-Party System", dalam Robert E. Goodin and Hans-dieter Klingemann (Ed.). *4 New Handbook of Political Science*. Oxford: Oxford University Press.
- Fred Block. 1977. "The Ruling Class Does Not Rule: Notes on the Marxist Theory of the State". *Socialist Revolution*, 7.
- Gabriel A. Almond. 2000. "Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik" dalam Mohtar Mas'oed dan Colin Mac Andrews. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: GMU Press.
- \_\_\_\_\_ dan G. Bingham Powell. 1986. *Comparative Politic Today a World View* Princeton: Princeton University Press.
- \_\_\_\_\_ dan Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik, dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_ dan James S. Coleman. 1960. *The Politics of Developing Areas* Princeton: Princeton University Press.
- \_\_\_\_\_ dan Bingham Powell. 1966. *Comparative Politics: Developmental Approach*. Boston: Little Brown.
- Gaetano Mosca. 1976. *The Rulling Class*. New York: Mc Graw Hill.
- Guillermo O'Donnel. 1973. *Modernization and Bureaucratic Authoritarianism: Studies in South American Politics*. California University Press, Barkeley: Centre of International Studies.
- \_\_\_\_\_. 1988. *Bureaucratic Authoritianism: Argentina, 1966-1973*. Los Angeles and London: California Unversity Press.
- Harry Holbert Turney-High. 1981. *The Military*. Carolina-USA: University of Carolina Press.
- Hasnan Habib. 2002. "Hubungan Sipil-Militer Pasca Orde Baru dan Prospeknya di Masa Depan", dalam *Buletin Progresif*. Vol. II No. I Oktober. Jakarta: Fisip UI.



- Henk Schulte Nordholt. 2005. "Decentralisation in Indonesia: Less State, More Democracy?". dalam John Harris *et.all. Politicing Democracy The New Local Politics of Democratisation*. New York: Palgrave Mac Millan Ltd.
- Hetifah Sj. Sumarto. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Howard Wiarda. 1981. *Corporatism and National Development in Latin America*. Boulder, Colorado: Westview Press.
- Huntington. 1991. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman and London: University of Oklahoma Press.
- J. Kristiadi. "Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia", dalam *Prisma*. No. 3-1996. Jakarta: LP3ES.
- J. Taylor. 1974. "Neo Marxism and Underdevelopment: A Sociological Phantasy." *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 4, No. 1
- James Malloy (Ed.). 1977. *Authoritarianism and Corporatism in Latin America*. Pittsburg: University of Pittsburg Press.
- James S. Coleman. 1968. "Modernization: Political Aspect", dalam David L. Shills (Ed.). *International Encyclopedia of the Social Science*. Vol 10. New York: the Macmillan Co., and the Free Press.
- John Dewey. 1954. *The Publics and Its Problems*. Denver.
- John Friedmann. 1992. *Empowerment: the Politics of Alternative Development*. Cambridge MA DAN Oxford UK: Blackwell.
- John Locke. 1960. *Two Treatises of Government*. New York: Cambridge University Press.
- Jon Pierre dan Guy Peters. 2000. *Governance, Politics, and the State*. London: MacMillan Press.
- Karl D. Jackson. 1978. "The Prospect for Bureaucratic Polity in Indonesia". dalam Karl D. Jackson dan Lucian W. Pye, (Ed.). *Political Power and Communication in Indonesia*. Berkeley: University of California Press.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Kewajiban Tradisional, Islam, dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat*. Jakarta: Grafiti.



- Kenneth A. Rasinski dan Tom R. Tyler. 1986. *Political Behavior Annual*. Vol 1. Colorado: Westview Press.
- Kenneth J. Meier dan Laurence J. O Toole Jr. 2006. *Bureaucracy in a Democratic State. A Governance Perspective*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Kompas, 4 Oktober 2005.
- Kompas, 5 Oktober 2005.
- Kunarto. 1997. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Larry Diamond. 1994. "Toward Democratic Consolidation", *Journal of Democracy*. Vol. 5 No. 3, Juli 1994.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Developing Democracy*. Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press.
- \_\_\_\_\_. et.al. (Eds.). 1990. *Politics in Developing Countries: Comparing Experiences with Democracy*. Colorado: Boulder, Lynne Rienner.
- \_\_\_\_\_ dan Marc F. Palttner. 2001. *Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lester G. Slegman dkk. 1989. *Elit dalam Modernisasi*. Yogyakarta: Yogyakarta.
- Lester Milbrath dan M.L. Goel. 1977. *Political Participation*. Chicago: Rand McNally College Publishing Co.
- Lewis Feuer. (Ed.). 1969. *Marx and Engels: Basic Writings on Politics and Philosophy*. Montana.
- Lipset dan Solari dalam J.W. Schoorl. 1982. *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*. Jakarta: Gramedia.
- Loekman Soetrisno. 1992. *Menuju Masyarakat Partisipasi*. Jakarta: Kanisius.
- Lucian Pye. 1963. *Communications and Political Development*. Princeton: Princeton University Press.
- \_\_\_\_\_. 1966. *Aspects of Political Development*. Boston: Little Brown.
- M. Mas'ud Said. 2007. *Birokrasi di Negara Birokratis: Makna Masalah dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia*. UMM Press.
- Mabes ABRI. 1998. *ABRI Abad XXI: Redefinisi dan Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa*. Jakarta: t.p.



- Mabes TNI. 1999. *Paradigma Baru Peran TNI: Sebuah Upaya Sosialisasi*. Mabes TNI. Edisi III Hasil Revisi. Jakarta: t.p.
- Martin Albrow. 2005. *Birokras*. Cet. Ke-3. Yogyakarta: Wacana.
- Martin Shaw. 1992. *Post Military Society*. London Oxford University Press.
- Mary Grisez Kweit dan Robert W. Kweit. 1986. *Konsep dan Metode Analisa Politik*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Maurice Duverger. 1987. *Sosiologi Politik*. Rajawali Pers.
- Michael C. Desh. 2002. *Politisi Versus Jenderal, Kontrol Sipil atas Militer di Tengah Arus yang Bergeser*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Michael Walzer. 1983. *Spheres of Justice: a Defense of Pluralism and Equality*. New York: Basic Books.
- Miftah Thoha. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miriam Budiardjo. 1982. "Partisipasi dan Partai Politik: Suatu Pengantar" dalam Miriam Budiardjo (Penyunting). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: YOI.
- \_\_\_\_\_.t.t *Aneka Pemikiran tentang Kekuasaan dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Miriam Golden. 1986. "Interest Reorientation, Party System and State". *Comparative Politics*. April 1986.
- Mohtar Mas'oed. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES.
- Morris Janowitz. 1964. *The Military in the Political Development of New Nations*. Chicago: University of Chicago Press.
- Myron Weiner. 1968. "Political Integration and Political Development" dalam J.L. Finkle dan R.W. Gable. *Political Development and Social Change*. New Yorx: John Wiley.
- Nazaruddin Sjamsuddin.t.t. *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.



- Nico T. Budi Harjanto. 1999. Masa Depan Peran TNI dalam Tatatan Demokrasi di Indonesia: Harapan Kalangan Militer", dalam Rizal Sukma dan J. Kristiadi (Penyunting). *Hubungan Sipil Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: CSIS.
- Oscar Garcia Luengo. 2006. *E-Activism New Media and Political Participation in Europe*. (CONFINes 2/4 agosto-diciembre).
- Peter B. Evan. et.al. (Eds.). 1985. *Bringing the State Back in*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Peter Evan. t.t. *Dependent Development: the Alliance of Multinational, State, and Local Capital in Brazil*. Princeton: Princeton University Press.
- Peter Hagul. (Ed.). 1985. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat Desa*. Jakarta: Rajawali.
- Philippe C. Schmitter. 1974. "Still the Century of Corporatism?", dalam Frederick Pike dan Thomas Stritch (Eds.). *The New Corporatism Notre Dame*. Notre Dame University Press.
- Philippe C. Schmitter dan G. Lehmbruch. (Eds.). 1979. *Trend Towards Corporatist Intermediation*. Beverly Hills: Sage.
- Priyo Budi Santoso. 1995. *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Rebbeca L. Schiff. 1998. "Conception of Civil-Military Relations and Democracy", dalam David L. Mares (Ed.). *Civil-Military Relations: Building Democracy and Regional Security in Latin America, Southern Asia and Central Europe*. Boulder, Co Westview Press.
- Republika*, 31 Desember 2000.
- Richard Higgott. 1983. *Political Development Theory*. London: Croom Helm.
- Richard Robison. 1982 "The Transformation of the State in Indonesia," *Bulletin of Concerned Asian Scholars*. Vol. 3. No. 2 (Januari-Maret).
- \_\_\_\_\_. 1986. *Indonesia, The Rise of Capital*. North Sydney, Wellington, England and USA: Allen and Unwin.
- \_\_\_\_\_. 1988. "Authoritarian States, Capital Owning Classes, and the Politics of Newly Industrializing Countries: the Case of Indonesia". *World Politics*, XLI (1) October.



- \_\_\_\_\_ dan Garry Rodan (Eds.). 1993. *Southeast Asia in the 1990s: Authoritarianism, Democracy, and Capitalism*. Sydney: Allen and Unwin.
- Richard Rose dan Ian McAllister. 1990. *The Loyalties of Voters: a Lifetime Learning Model*. London and Newbury park and California: Sage.
- Robert Brenner. 1977. *The Origins of Capitalist Development: a Critique of Neo Smithian Marxism*. New Left Review. No. 104.
- Robert D. Putnam dalam Mochtar Mas'ood dan Colin MacAndrews. 1978. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Robert Dahl. 1971 *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- Robert Putnam. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Robert Wade. 1990. *Governing the Market*. Princeton: Princeton University Press.
- Robin Lukcham. 1981. "Militarism, Force, Class and International Conflict", dalam M. Smith dan R. Shackleton (Eds.). *Perspective on World Politics*: London: Croom Helm.
- Rohman Achwan. 2000. "Good Governance: Manifesto Politik Abad Ke-21". *Kompas*, 26 Juni.
- Ronald Beiner. (Ed.). 1995. *Theorizing Citizenship*. Alabany, NY: State University of New York Press.
- Ronald H. Chilcote. 2003. *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S. Yunanto dan Ali A. Wibisono. 2005. "Quo Vadis Pengambilalihan Bisnis TNI", dalam Beni Sukadis dan Eric Hendra. *Menuju TNI yang Profesional: Restrukturisasi Bisnis TNI*. Jakarta: LESPERSSI dan Friedrich Ebert Stiftung.
- S.P. Varma. 1954. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Samuel Huntington. 1957. *The Soldier and the State: the Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Cambridge: Harvard University Press.
- \_\_\_\_\_. 1965. "Political Development and Political Decay", *World Politics*. No. 17. April.
- \_\_\_\_\_. 1968. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press.



- \_\_\_\_\_. 1971. *"The Change to Change: Modernization, Development and Politics"*. Comparative Politics. No. 3.
- Samuel P. Huntington. 2000. "Mereformasi Hubungan Sipil-Militer", dalam Larry Diamond dan Marc F. Plattner (Ed.). *Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_ dan Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sartono Kartodirdjo. 1974. *Kepemimpinan dalam Sejarah Indonesia*. Buletin No.2/1974. Yogyakarta: Balai Pembinaan Administrasi UGM.
- Silvia Bolgherini. 2010. "Participation" dalam Mauro Calise and Theodore J. Lowi. *Hyperpolitics: an Interactive Dictionary of Political Science Concept*. Chicago: The University of Chicago.
- Singh.t.t. *Hubungan Sipil-Militer dalam Demokrasi di Indonesia*. t.t.p.:t.p.
- Soebijono dkk. 1992. *Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Perannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Stephan Haggard. 1990. *Pathways from the Periphery*. Ithaca: Cornell University Press.
- Sulastomo. 2001. *Demokrasi atau Democracy*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suwarsono dan Alvin Y. So. 1994. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta LP3ES.
- Suzanna Keller. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit- Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suzanne Keller. 1984. *Penguasa dan Kelompok Elit*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syahdatul Khafie. 2002. *Peran Politik Militer Indonesia: Tuntutan atau Kepentingan dalam Buletin Progresif Vol. II No. I Oktober*. Jakarta: Fisip UI.
- T.B. Bottomore. 1964. *Elit and Society*. Canada: Penguin Books.
- Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Ulf Sundhaussen. 1986. *Peran Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi*



ABRI. Jakarta: LP3ES.

William Kornhauser 1959. *The Politics of Mass Society*. New York: Free Press.

William Liddle. 1992. *Pemilu-pemilu Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.

Yahya Muhaimin dan Collin Mac Andrews. 1995. *Masalah-masalah Pembangunan Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Yuddy Chrisnandi. 2005. "Tujuh Tahun Reformasi TNI", dalam *Kompas*, Rabu, 5 Oktober 2005.

\_\_\_\_\_. 2005. *Reformasi TNI: Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.

Zainuddin Maliki. 2000. *Birokrasi, Militer, dan Partai Politik dalam Negara Transisi*. Yogyakarta: Galang Press.

\_\_\_\_\_. 2001. "Sejarah Politik Militer dan Transisi Menuju Demokrasi di Indonesia", dalam Zainuddin Maliki (Editor) *Demokrasi Tersandera*. Yogyakarta: Galang Press.



## BAB 2

# PARTISIPASI POLITIK DAN PERILAKU PEMILIH

Partisipasi politik masyarakat, khususnya partisipasi pada saat pemilihan umum dalam ilmu politik terangkum sebagai bagian dari kajian perilaku politik. Menurut Huntington dan Joan Nelson, partisipasi politik merupakan sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas (action) yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya memengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintah.<sup>1</sup> Senada dengan pendapat Huntington dan Nelson, Rasinski dan Tyler<sup>2</sup> mengungkapkan bahwa inti partisipasi politik adalah tindakan masyarakat yang dapat memengaruhi keputusan politik. Adapun menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dalam partai politik yang mencakup semua kegiatan sukarela, yang menuntut seseorang untuk ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin politik dan ikut langsung ataupun tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum.<sup>3</sup> Asumsinya bahwa orang yang paling mengetahui tentang keinginan masyarakat adalah masyarakat atau individu tersebut. Oleh karena itu, partisipasi politik individu dalam masyarakat sangat berperan dalam menentukan kebijakan

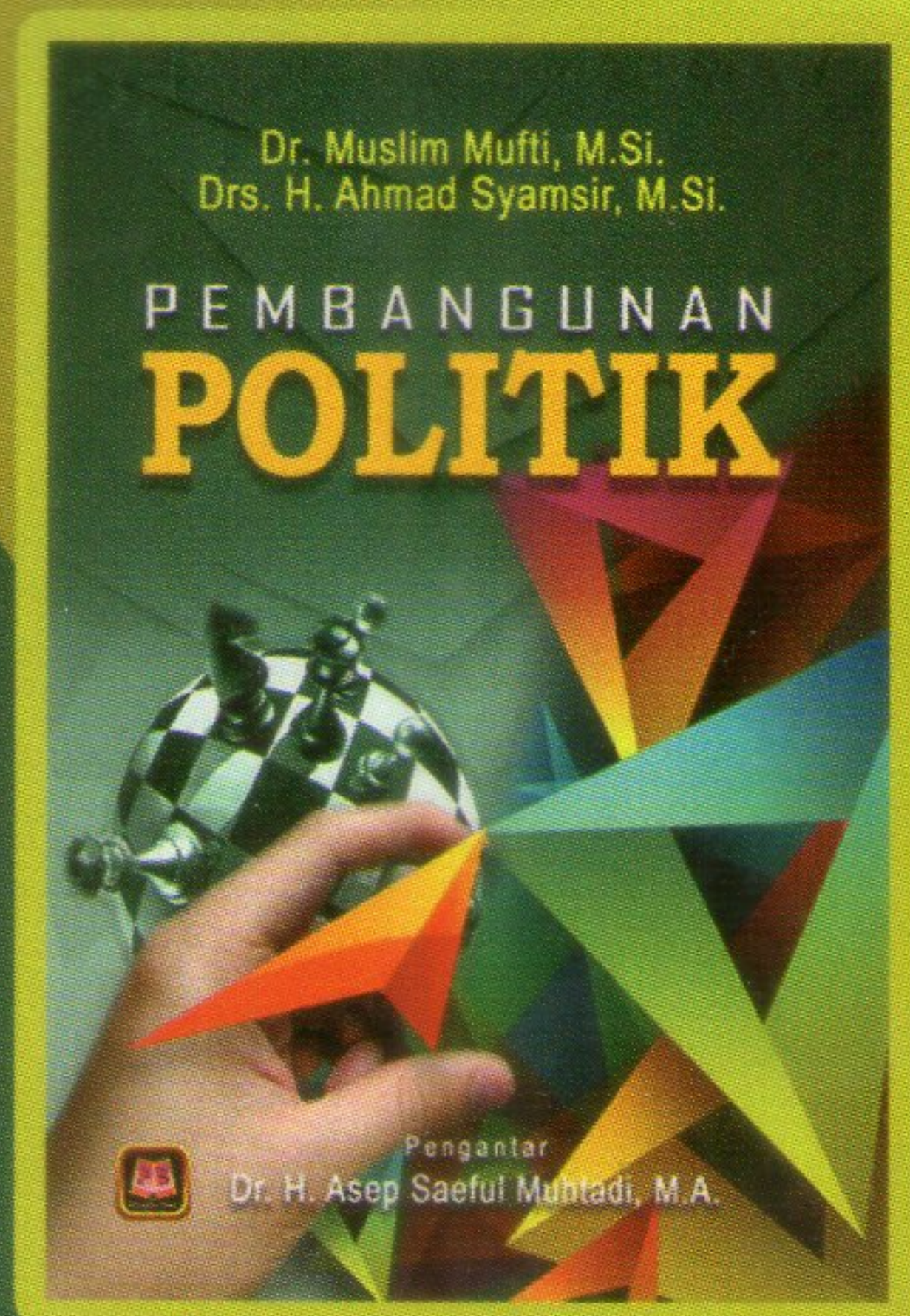
---

1. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm 5; bandingkan dengan Miriam Budiardjo, "Partisipasi dan Partai Politik: Suatu Pengantar" dalam Miriam Budiardjo (Penyunting), *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: YOI, 1982, hlm. 2.

2. Kenneth A. Rasinski dan Tom R. Tyler, *Political Behavior Annual*, Vol. 1, Colorado: Westview Press, 1986, hlm. 110.

3. Miriam Budiardjo, *ibid.*, hlm. 3.





# PEMBANGUNAN POLITIK

Pembangunan politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional Indonesia. Hal ini disebabkan keberhasilan dalam pembangunan politik dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi keberhasilan

pembangunan nasional secara keseluruhan. Sebaliknya, keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang lainnya (ekonomi, sosial, budaya) juga akan memperlancar pembangunan politik. Kegagalan dalam pembangunan politik sudah pasti akan mengganggu pembangunan nasional secara keseluruhan. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan politik merupakan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Pembangunan politik tersebut membentuk berbagai wahana yang mutlak diperlukan untuk menggerakkan roda pembangunan nasional.

Tujuan yang ingin dicapai oleh pembangunan politik adalah terbentuknya sistem politik yang demokratis dan rakyat menikmati kebebasan, termasuk kebebasan untuk menjalankan pengawasan terhadap pemerintah. Dengan kata lain, tujuan utama pembangunan politik adalah terbentuknya sistem politik yang demokratis. Oleh karena itu, pembangunan politik juga dapat dianggap sebagai demokratisasi kehidupan politik.

Dengan sedikit uraian tersebut saja para pembaca dapat mudah memahami substansi materi yang terdapat dalam buku ini, yang di samping terminologi politik dengan pendekatan historis yang mendalam, juga mengupas jelas politik dalam makna filosofis yang dikembangkan oleh para pemikir sekaligus pelaku politik, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain yang lebih bombastis dan lebih terbuka menyuarakan demokrasi. Penulis juga membahas keterlibatan militer dalam bisnis dan politik yang menggambarkan mulai merontoknya netralitas militer di tengah perpolitikan di bumi Nusantara ini.



PENERBIT **PUSTAKA SETIA**

Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164  
Telp. (022) 5210588 | Fax. (022) 5224105  
E-mail. [pustaka\\_seti@yahoo.com](mailto:pustaka_seti@yahoo.com)  
BANDUNG 40253

[www.pustakasetia.com](http://www.pustakasetia.com)

ISBN 978-979-076-615-0



PEMBANGUNAN POLITIK